

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian, khususnya peternakan, memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Usaha peternakan sendiri pada dasarnya adalah industri biologis yang melibatkan beberapa aspek penting: peternak sebagai subjek, hewan ternak sebagai objek, lahan sebagai ekologi, dan teknologi sebagai alat bantu. Pengembangan peternakan tidak bisa dilepaskan dari peran kelompok peternak yang berupaya meningkatkan nilai tambah dan efisiensi pengelolaan ternak mereka. Untuk memperkuat kelompok peternak ini, diperlukan upaya pembinaan dan pemantapan melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani dan peternak di pedesaan. Dalam konteks ini, penyuluhan memegang peranan vital dalam membangun interaksi di antara kelompok peternak. Menurut Sumardjo (2009), penyuluhan adalah upaya untuk membangun masyarakat secara konvergen, dialogis, dan partisipatif. Tujuannya adalah membantu masyarakat beralih dari sikap apatis dan ketergantungan menjadi masyarakat subsisten, kemudian berkembang menjadi mandiri.

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang penyuluh diharuskan memiliki kompetensi kerja yang baik, yakni memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumardjo (2006) bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Walaupun penyuluh telah memiliki pengetahuan namun, hal tersebut belum dapat memberikan jaminan bahwa penyuluhnya dapat melakukan tugas dengan baik atau tidak. Kondisi petani ternak pada saat ini menunjukkan adanya peningkatan wawasan, pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap kritis terhadap pembangunan pertanian dan peternakan. Hal ini ditunjukkan dengan tuntutan petani ternak terhadap pelayanan penyuluhan yang bermutu sesuai kebutuhannya. Kondisi ini tentunya memerlukan adanya penyuluh yang memiliki kompetensi di bidangnya yakni memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang didasari dengan pengetahuan dan keterampilan. Saat ini kompetensi seorang penyuluh terkadang memiliki kendala dalam pelaksanaannya, hal tersebut mengakibatkan

terganggunya proses dalam penyuluhan di bidang pertanian dan peternakan. Penyuluh pertanian di bidang peternakan sering kesulitan mengembangkan kapasitas profesional mereka sebagai pejabat fungsional. Ini karena mereka dibebani berbagai kegiatan yang ditetapkan atasan, yang terkadang tidak sejalan dengan tugas inti seorang penyuluh peternakan profesional. Sumardjo (2008) menduga bahwa rendahnya kompetensi penyuluh ini salah satunya disebabkan oleh proses pembelajaran yang kurang berkualitas, dimana penyuluh, katanya sering kali terjebak dalam tuntutan formalitas penyesuaian ijazah demi jabatan fungsional.

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki sentral peternakan, dimana sebagian besar kehidupan masyarakatnya hidup dari hasil pertanian dan peternakan diharapkan menjadi tolak ukur suksesnya program penyuluhan pertanian peternakan di Indonesia. Hal ini didasari bahwa kabupaten lima puluh kota menjadi *role model* dalam pengembangan usaha peternakan. Namun kondisi di lapangan saat ini menggambarkan bahwa tingkat pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hasil laporan kinerja instansi tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaksanaan program pengembangan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum berjalan secara optimal. Salah satu faktor penghambat dalam pengembangan peternakan ini dapat disebabkan oleh penyuluhan. Dimana hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kutipan berikut ini:

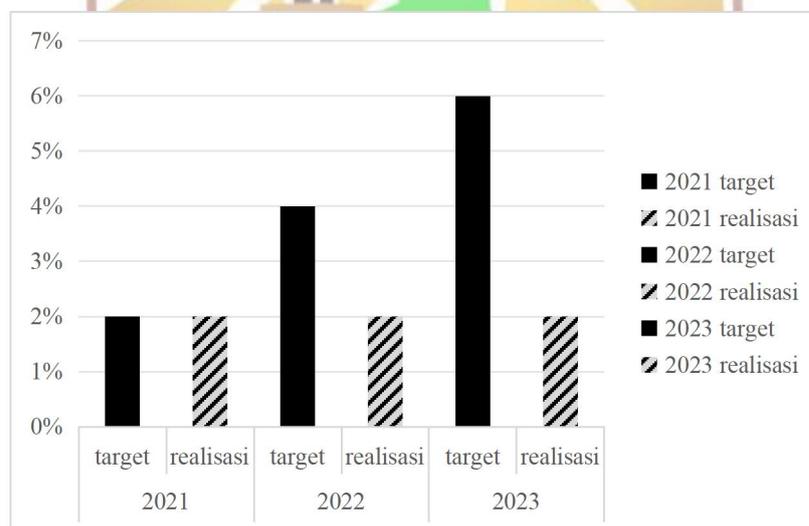
“Kualitas dan kuantitas penyuluh di Kabupaten Lima Puluh Kota masih kurang. Penyuluh merasa kesusahan dalam memberikan penyuluhan karena masih adanya perbedaan antara pola pikir dan juga cara bekerja masing-masing penyuluh”

Adanya penyuluh yang berkompentensi akan membuat pembinaan kepada petani peternak menjadi lebih baik sehingga akan berdampak kepada peningkatan produktifitas usaha pengembangan peternakan. Saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 17 orang Penyuluh Peternakan dengan jumlah kelompok peternak binaan sebanyak 704 kelompok yang tersebar di 13 Kecamatan, dimana jumlah

populasi ternak kambing tercatat sebanyak 30.342 ekor, sapi sebanyak 48.451 ekor, kerbau sebanyak 8.843 ekor, dan Ayam buras 405.016 ekor (BPS 2022). Dengan masing-masing penyuluh yang membina antara 10 hingga 40 kelompok peternak, sehingga beban kerja mereka jelas akan meningkat. Mengingat keterbatasan jumlah penyuluh tersebut, sangat penting bahwa perencanaan dan peningkatan wawasan petani peternak yang dilakukan oleh penyuluh tidak terlepas dari kompetensi yang wajib mereka miliki.

I.2 Masalah Penelitian

Dalam pengembangan sektor peternakan dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Agar terciptanya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang merupakan tujuan dalam melaksanakan penyuluhan, dibutuhkan kompetensi penyuluhan salah satunya kompetensi manajerial. Hal ini sangat penting karena berkaitan langsung dalam penyampaiannya ke masyarakat. Namun pelaksanaan penyuluhan saat ini lebih banyak berorientasi pada pencapaian program-program pemerintah yang bertolak ukur pada peningkatan produksi komoditi strategis tanpa memperhatikan kompetensi dari petugas penyuluh itu sendiri.



Gambar 1. Pengukuran kinerja penyuluh pertanian sektor peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota (*LKjIP Disnakeswan 2024*)

Gambar 1 menyajikan data target dan realisasi kinerja penyuluh pertanian sektor peternakan dalam pembinaan kelompok ternak (peningkatan penambahan

jumlah kelompok ternak yang mencapai level kemandirian) di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode tiga tahun: 2021, 2022, dan 2023.

Pada tahun 2021, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan target sebesar 2%. Realisasi yang dicapai pada tahun 2021 adalah 2%, yang berarti target 100% tercapai. Hasil ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program di tahun pertama dan mengindikasikan efektivitas awal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahun 2022, Target kinerja ditingkatkan secara signifikan menjadi 4%, dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Namun, realisasi capaian tetap stagnan pada angka 2%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 50% dari target yang berhasil dicapai. Pada tahun 2023, peningkatan target dilakukan kembali dan ditetapkan pada angka 6%. Meskipun demikian, realisasi kinerja tetap stagnan di angka 2% yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 33.3% dari target yang mampu direalisasikan. Kesenjangan ini mengindikasikan munculnya permasalahan dalam menyesuaikan kapasitas pelaksanaan dengan peningkatan target yang lebih. Nilai stagnasi realisasi pada angka 2% selama dua tahun berturut-turut, di tengah kenaikan target yang signifikan, menjadi indikator kuat bahwa terdapat hambatan dalam upaya peningkatan penambahan jumlah kelompok ternak yang mencapai level kemandirian. Realisasi kinerja yang rendah ini mencerminkan adanya potensi masalah dalam kompetensi penyuluh, terutama dalam kemampuan mereka untuk melaksanakan pembinaan kepada peternak di lapangan.

Memiliki penyuluh dengan kompetensi yang tinggi sangat penting dalam meningkatkan kualitas penyuluhan, mendukung pengembangan sektor peternakan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan sektor peternakan. Mengetahui tingkat kompetensi penyuluh pertanian sektor peternakan merupakan investasi yang sangat penting untuk masa depan pembangunan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 15 orang Penyuluh pertanian sektor Peternakan dengan tingkat pengalaman berbeda dan tingkat Pendidikan yang beragam seperti dokter hewan, sarjana peternakan, diploma peternakan dan SMK peternakan. Dengan mengetahui tingkat kompetensi penyuluh, dapat membantu mengidentifikasi

kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki penyuluh dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan. Hal ini menjadi alasan penting untuk diteliti mengenai kompetensi penyuluh pertanian khususnya pada sektor Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kompetensi penyuluh pertanian sektor peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyuluh pertanian sektor peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan tingkat kompetensi penyuluh pertanian sektor peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyuluh peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota

I.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Dalam bidang akademis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu penyuluhan pembangunan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi penyuluh peternakan.